



RENSTRA PERUBAHAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

TAHUN 2019-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda pembangunan, visi serta misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Perubahan Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Review Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih.

Slawi, Juni 2021

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tegal



DESSY ARIFIANTO, SSos MT

Pembina Tk. I
NIP. 197212161997031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, secara berkesinambungan guna mencapai harapan yang dicita-citakan. Dalam mengawali pembangunan daerah tersebut, diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tegal periode 2019-2024. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal; serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal perlu

menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal Tahun 2020, khususnya di Kabupaten Tegal dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan Kabupaten Tegal.

Sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang ditetapkan pada tahun 2021 ini, maka dilakukan reuiu internal dan selanjutnya dilakukan revisi/perubahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4), bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahann Renstra Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 berdasarkan hasil reuiu internal yang dilakukan, mencakup :

1. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Penyempurnaan indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal; dan
3. Penyesuaian nomenklatur dan kodefikasi program dan kegiatan serta penambahan subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

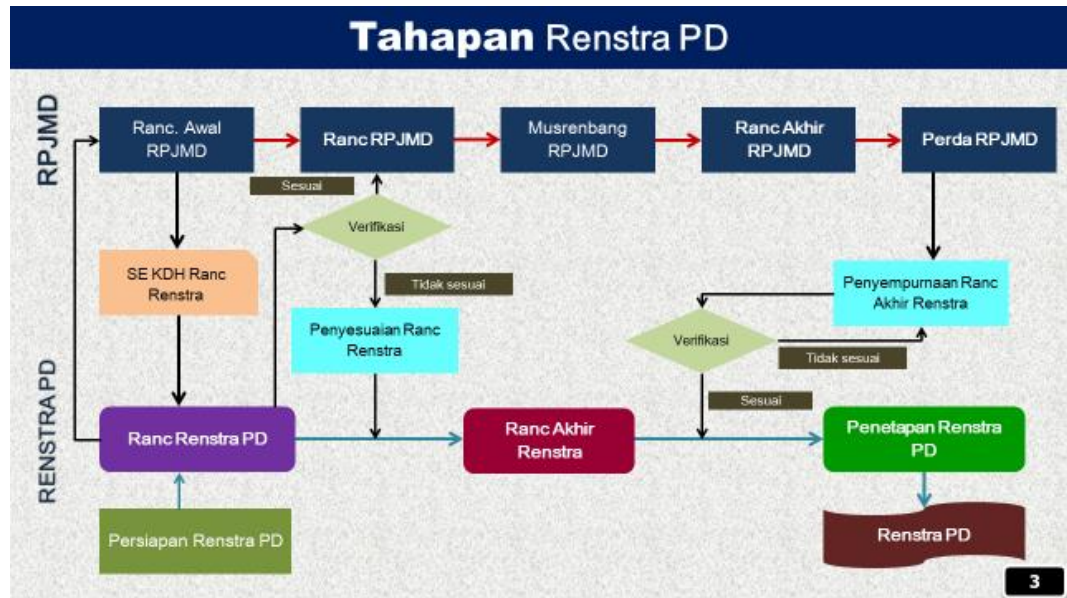
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perubahan Renstra yang disusun mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2012-2032 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Sedangkan keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tegal.
2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD.
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program selama 5 tahun.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan Review Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode tahun 2019 - 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

- Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
- r. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif untuk kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat pandemi covid-19.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik kurun waktu tahun 2017-2022, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam kurun waktu tahun 2019-2024, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal; dan
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2019-2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal periode 2019 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

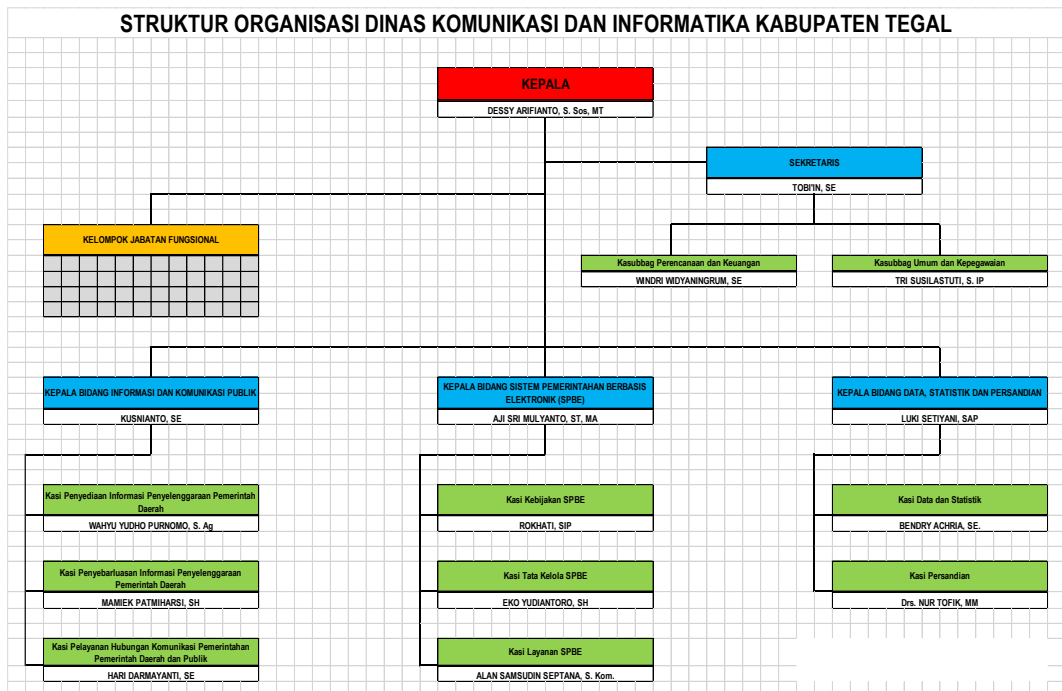
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu diatur lebih lanjut Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



Sedangkan menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, diuraikan sebagai berikut :

A. KEWENANGAN

- a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.
- b) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.
- c) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten
- d) Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten.
- e) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten.
- f) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEPALA DINAS

- 1) Tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- 2) Fungsi :
 - a. Penetapan rencana kerja;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- 3) Uraian Tugas :
- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja dinas mencapai target yang ditetapkan;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
 - g. Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - h. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang komunikasi,

- informatika, statistik, dan persandian;
- i. Menyelenggarakan kersajama dan kemitraan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
 - j. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - k. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
 - l. Membina pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, dan aset dinas;
 - m. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - o. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - q. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Tanggung Jawab :
- a. Tersusunnya perencanaan dinas;
 - b. Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - c. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - d. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di

- bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- e. Terbinanya pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, aset, umum, dan kesekretariatan /ketatausahaan dinas;
 - f. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 - g. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas

2. SEKRETARIS

- 1) Tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas.

2) Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan dinas;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, aset, dan umum dinas;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan

3) Uraian Tugas :

- a. Menyusunan rencana kerja;

- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan rencana kerja dinas;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- e. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DKA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- f. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), indikator kinerja utama (iku), perjanjian kinerja (pk) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP), evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengendalian operasional kegiatan (POK), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengelola sistem informasi dan data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu dinas;
- j. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
 - l. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
 - m. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4) Tanggung Jawab :

- a. Tersedianya rencana kerja sekretariat;
- b. Kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja dinas;
- c. Ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan/ ketatausahaan dan perumusan draf kebijakan teknis dinas;
- d. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang kesekretariatan/ ketatausahaan;
- e. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- f. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- g. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan tugas sekretariat.

A. Kepala Subbagian Perencanaan Dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Membantu sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

2) Fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas;
- c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dinas;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang perencanaan, keuangan dan penganggaran;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Dan Keuangan

B. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian

1) Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol

2) Fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. Pengelolaan kearsipan dinas;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum Dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik

2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan

- pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
 - f. Pelaksanaan administrasi di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik
- 3) Uraian Tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja

- bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah Daerah dan publik;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah Daerah dan publik, yaitu :
 - a) merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b) melaksanakan monitoring opini dan aspirasi publik melalui media elektronik maupun konvensional;
 - c) melaksanakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - d) melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik (cetak/penyiaran/daring/social/luar ruang/komunikasi tatap muka);
 - e) melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f) melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - g) melaksanakan layanan hubungan media;
 - h) melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i) melaksanakan manajemen komunikasi krisis (untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga pemerintah daerah);
 - j) melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi

- penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
- h. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - i. Menyelia pelaksanaan tugas bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
 - l. Mengoordinasikan penyusunan bahan penyusunan laporan kinerja (LKJ), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
 - m. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
 - o. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
 - p. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh

tanggung jawab

- 4) Tanggung Jawab :
 - a. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang informasi dan komunikasi publik;
 - c. Tersusunnya perencanaan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - d. Terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik;
 - e. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik;
 - f. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas
- A. Kepala Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 1) Tugas Pokok
Membantu kepala bidang informasi dan komunikasi publik dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - 2) Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- B. Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 1) Tugas Pokok
Membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan

kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Kepala Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah Dan Publik

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah dan publik.

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang informasi dan komunikasi publik dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah dan Publik.

4. Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2) Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
 - f. Pelaksanaan administrasi di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE.
- 3) Uraian Tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan renstra, renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE, yaitu :

- a) menyusun rencana induk dan menyediakan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
 - b) mendaftarkan dan menggunakan nama domain dan sub domain pemerintah daerah;
 - c) menyelenggarakan infrastruktur dasar ruang *server* dan *network operation center* (noc);
 - d) menyelenggarakan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
 - e) menyelenggarakan sistem jaringan komunikasi intra pemerintah daerah;
 - f) menggunakan dokumen dan informasi elektronik;
 - g) membangun dan mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - h) membangun dan menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah (SPLPD);
 - i) menyediakan ekosistem kota cerdas (*smart city*);
 - j) mengelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
 - k) membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan *government chief information officer* (gcio) daerah.
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
 - h. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - i. Menyelia pelaksanaan tugas bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas;

- k. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
- l. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja (LKJ), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- m. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- o. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- p. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

4) Tanggung Jawab :

- a. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang SPBE;
- c. Tersusunnya perencanaan teknis bidang SPBE;
- d. Terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan layanan SPBE;
- e. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang SPBE;
- f. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas

A. Kepala Seksi Kebijakan SPBE

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang SPBE dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebijakan SPBE.

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang SPBE dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Kebijakan SPBE.

B. Kepala Seksi Tata Kelola SPBE

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang SPBE dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang tata kelola SPBE

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang SPBE dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata kelola SPBE

C. Kepala Seksi Layanan SPBE

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang SPBE dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang layanan SPBE.

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang SPBE dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Layanan SPBE.

5. Kepala Bidang Data, Statistik Dan Persandian

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang data statistik dan persandian.

2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang data statistik dan persandian;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang data statistik dan persandian;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang data, statistik dan persandian;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang data, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang data, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang data, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang data, statistik dan persandian.

3) Uraian Tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang data, statistik dan persandian;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang data, statistik dan persandian,

yaitu :

- a) menyelenggarakan statistik sektoral pemerintah daerah;
 - b) menyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
 - c) menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten.
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang statistik dan persandian;
 - h. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang statistik dan persandian, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - i. Menyelia pelaksanaan tugas bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
 - j. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
 - l. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja (LKJ), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
 - m. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
 - o. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
 - p. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

4) Tanggung Jawab :

- a. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang data, statistik dan persandian;
- c. Tersusunnya perencanaan teknis bidang data, statistik dan persandian;
- d. Terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan di bidang data, statistik dan persandian;
- e. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Data, Statistik Dan Persandian;
- f. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas;

A. Kepala Seksi Data Statistik

1) Tugas Pokok

Membantu kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang data statistik.

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Data Statistik.

B. Kepala Seksi Persandian

1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang persandian.

2) Fungsi

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Persandian.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal sebanyak 34 orang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Gol	Jumlah
1.	Kepala Dinas	IV/b	1
2.	Sekretaris	IV/b	1
3.	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	IV/a	1
4.	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	IV/a	1
5.	Kepala Bidang Data, Statistik Dan Persandian	III/d	1
6.	Kapala Sub Bag Perencanaan Dan Keuangan	III/c	1
7.	Kapala Sub Bag Umum Kepegawaian	III/d	1
8.	Kepala Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	III/d	1
9.	Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	III/d	1
10.	Kepala Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah Dan Publik	III/d	1
11.	Kepala Seksi Kebijakan SPBE	III/b	1
12.	Kepala Seksi Tata Kelola SPBE	III/d	1
13.	Kepala Seksi Layanan SPBE	III/c	1
14.	Kepala Seksi Data dan Statistik	III/d	1

No	Uraian	Gol	Jumlah
15.	Kepala Seksi Persandian	III/d	1
16.	Staf		18
17.	Fungsional		1
JUMLAH			34

Keadaan pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1.	SD	1	
2.	SLTP	-	
3.	SLTA	7	
4.	D3	4	
5.	S1	19	
6.	S2	3	
Jumlah		34	

Sedangkan jumlah pejabat fungsional adalah sebagai berikut :

No	Pejabat Fungsional	Jumlah
1	Pranata Komputer Pelaksana	0
2	Pranata Komputer Pertama	1
3	Pranata Komputer Muda	0
Jumlah		1

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Kominfo Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	ASET TETAP		
	PERALATAN DAN MESIN		
	- Alat Besar	1	79.013.000
	- Komputer	304	4.367.467.356
	- Alat Angkutan	18	1.344.181.481
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	4	81.084.900
	- Alat Pertanian	2	990.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	263	999.821.149
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	117	1.422.864.976
	GEDUNG DAN BANGUNAN	1	799.814.835
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	9.527.500
	- Jaringan Litrik		
	JUMLAH ASET		9.104.765.197

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal periode 2019-2024 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel 2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014-2019), Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024), dan

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014-2019)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Indikator Sasaran																			
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Prosen			0,00	0,00	0,00	76,00	78,00				76,25	74,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,33	95,69	
	Prosentase jumlah FK METRA yang aktif	Prosen			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	100	100,00	
	Prosentase jumlah LKM KIM aktif yang aktif	Prosen			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	100	100,00	
	Prosentase OPD yang telah menerapkan keamanan informasi	Prosen			0,00	0,00	0,01	50,00	65,00				-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0,00	
	Prosentase OPD yang menerapkan SIMAYA	Prosen			0,00	0,00	0,00	10,00	15,00				10,00	10,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100	69,47	
	Persentase pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika	Prosen			0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	100	100	
	Indikator Program																			
1	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	buah					4,00	5,00	5,00				4,00	5,00	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
2	Jumlah kerjasama dengan media massa	buah					6,00	6,00	6,00				6,00	6,00	6,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100

3	Jumlah pemohon informasi publik yang dilayani melalui PPID	orang					13,00	14,00	15,00			13,00	14,00	15,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
4	Jumlah pelatihan Bidang TIK	kegiatan					1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
5	Jumlah Layanan Pemerintah Secara Elektronik	buah					3,00	3,00	3,00			3,00	3,00	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
6	Jumlah Dokumen Data Statistik Daerah yang terpublikasikan	buah					6,00	6,00	6,00			6,00	6,00	6,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
7	Jumlah Hotspot area yang difasilitasi pemda	buah					12,00	12,00	12,00			10,00	12,00	12,00	#DIV/0!	#DIV/0!	83,33	100	100
8	Jumlah database aktif	buah					28,00	28,00	28,00			28,00	28,00	28,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
9	Jumlah radio komunikasi	buah					30,00	31,00	32,00			6,00	6,00	6,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20	19,35	18,75
10	Jumlah instansi yang memiliki sistem informasi/website	buah					52,00	54,00	54,00			52,00	54,00	54,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
11	Jumlah instansi yang memiliki akses internet	buah					115,00	120,00	127,00			110,00	120,00	127,00	#DIV/0!	#DIV/0!	95,65	100	100
12	Tersedianya sarana layanan informasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	buah					4,00	4,00	5,00			3,00	4,00	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	75,00	100	100
13	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang paham TIK	%					90,00	90,00	95,00			80,00	90,00	95,00	#DIV/0!	#DIV/0!	88,89	100	100
14	Persentase pemanfaatan hosting dan collocation	%					50,00	80,00	80,00			50,00	80,00	80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100
15	Penilaian pemeringkatan e-government Indonesia (Pegi) Tingkat Provinsi	level					2,00	3,00	4,00			2,00	3,00	4,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100

16	Jumlah OPD yang memanfaatkan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemda	OPD					2,00	5,00			-	2,00	5,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100
17	Jumlah SDM yang mempunyai kompetensi dibidang persandian dan keamanan informasi melalui Diklat	orang					1,00	1,00			-	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100
18	Terbangunnya Bangunan/Gedung Kantor Dinas Kominfo Beserta Sarana dan Prasarana Pendukung Serta Perlengkapannya (alat-alat studio / radio / telekomunikasi, data centre, media centre, dan command center)	%				40,00	60,00	80,00			20,00	60,00	80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50	100	100

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indikator Tujuan																		
	Indeks SPBE	Indeks			2,75	3	3,25	3,4	3,55	3,11	NA	NA	NA	NA	113,09	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2	Indikator Sasaran																		
	Indeks SPBE	Indeks			2,75	3	3,25	3,4	3,55	3,11	NA	NA	NA	NA	113,09	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Indeks Keamanan Informasi	Indeks			272	300	350	400	456	262	NA	NA	NA	NA	96,32	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	Nilai			45	50	60	70	79	83,96	NA	NA	NA	NA	186,58	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Persentase			33	55	78	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	Persentase			20	40	60	80	100	26,84%	NA	NA	NA	16,80%	1,34	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0,17
	Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistic (SDS) / open data	Persentase			10	20	30	40	50	66,40%	NA	NA	NA	6	6,64	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	12,00
3	Indikator Program																		
	Indeks SPBE	Indeks			2,75	3	3,25	3,4	3,55	3,11	NA	NA	NA	NA	113,09	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Indeks Keamanan Informasi	Indeks			272	300	350	400	456	262	NA	NA	NA	NA	96,32	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	Nilai			45	50	60	70	79	83,96	NA	NA	NA	NA	186,58	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Persentase			33	55	78	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	Persentase			20	40	60	80	100	26,84%	NA	NA	NA	16,80%	1,34	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0,17
	Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistik (SDS) / open data	Persentase			10	20	30	40	50	66,40%	NA	NA	NA	6	6,64	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	12,00

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Realiasi					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indikator Tujuan									
	Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	OPD			NA	NA	NA	NA	NA	8
2	Indikator Sasaran									
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks			NA	NA	NA	1,65	2,18	3,53
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks			NA	NA	NA	2,14	2,57	2,29
	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks			NA	NA	NA	3,09	3,15	3,39
	Indeks Manajemen SPBE	Indeks			NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Nilai KIP Badan Publik	Skor			NA	NA	NA	41,6	68,55	83,96
	Indeks Keamanan Informasi	Indeks			NA	NA	147	147	147	262
	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	Data				NA	NA	NA	NA	10.000

	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase			NA	NA	NA	88,53%	90,80%	88,82%
3	Indikator Program									
	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persentase			NA	NA	12,50%	12,50%	16,67%	16,67%
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persentase			NA	NA	12,50%	12,50%	16,67%	16,67%
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase			10%	5%	15%	25%	30%	45,00%

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase			NA	18%	18%	19%	19%	51,60%
Persentase tingkat keamanan Informasi	Persentase			NA	NA	22,80%	22,80%	22,80%	40,62%
Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	Persentase			NA	NA	NA	NA	NA	38,15%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal 2015 – 2019

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			562.500	1.207.360	1.367.860			489.035	1.016.549									
1	Penyediaan Jasa surat menyurat			5.000	4.360	4.360			4.118	4.100	4.359			82,36	94,04	99,98	-6,40	5,94	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			325.000	918.000	1.050.000			267.198	741.697	870.930			82,21	80,79	82,95	98,42	2,16	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor			32.500	50.000	50.000			32.500	49.254	49.499			100,00	98,51	99,00	26,92	0,49	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000	20.000	20.000			10.242	15.549	19.938			68,28	77,75	99,69	12,50	21,94	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.000	20.000	15.000			15.000	19.842	14.997			100,00	99,21	99,98	0	0,77	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000	15.000	12.500			4.999	14.987	12.467			99,99	99,92	99,74	108,33	-0,18	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			10.000	10.000	11.000			9.720	9.320	10.556			97,20	93,20	95,96	5,00	2,76	
8	Penyediaan makanan dan minuman			35.000	50.000	60.000			32.032	44.656	52.992			91,52	89,31	88,32	31,43	-0,99	
9	Rapat-rapat koordinasi dan			120.000	115.000	140.000			113.224	114.306	139.980			94,35	99,40	99,99	8,79	0,59	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	konsultasi ke luar daerah																	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			0	5.000	5.000			0	2.835	4.930			0	56,70	98,60	0	41,9
II	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			985.000	1.026.704	485.000			900.307	956.949								
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			60.000	125.000	30.000			55.360	121.731	29.613			92,27	97,38	98,71	16,16	1,33
12	Pengadaan mebeleur			100.000	0	0			94.755	0	0			94,76	0	0	0	0
13	Pengadaan Komputer			400.000	186.704	230.000			365.275	177.800	201.877			91,32	95,23	87,77	-68,63	-7,46
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			25.000	100.000	50.000			23.085	96.920	48.769			92,34	96,92	97,54	125,00	0,62
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			150.000	175.000	175.000			134.349	135.613	137.720			89,57	77,49	78,70	8,33	1,21
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			20.000	50.000	50.000			17.967	41.135	22.277			89,84	82,27	44,55	125,00	-37,72
17	Pengadaan Peralatan LPSE			200.000	0	150.000			180.143	0	130.597			90,07	0	87,06	25,00	87,06
18	Penyusunan DED Gedung data centre			30.000	0	0			29.371	0	0			97,90	0	0	0	0

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
19	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor			0	200.000	0			0	197.291	0			0	98,65	0	0	0
20	Penataan Lingkungan Kantor			0	190.000	0			0	186.458	0			0	98,14	0	0	0
III	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000	50.000	88.500			41.027	42.142								
21	Pendidikan dan pelatihan formal			50.000	50.000	50.000			41.027	42.142	49.985			82,05	84,28	99,97	0	15,69
22	Survei kepuasan masyarakat			0	0	28.500			0	0	27.445			0	0	96,30	0	96,30
23	Maturitas SPIP			0		10.000			0	0	9.610			0	0	96,10	0	96,10
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50.000	50.000	55.000			37.930	42.319								
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			5.000	5.000	5.000			4.180	4.463	4.580			83,60	89,27	91,60	0	2,33
25	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah			45.000	45.000	50.000			33.750	37.856	43.708			75,00	84,12	87,42	5,55	3,3

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
IV	Program : Pengembangan data/informasi/statistik daerah			200.000	300.000	300.000			198.689	294.494									
26	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			100.000	200.000	200.000			98.770	197.511	196.694			98,77	98,76	98,35	50,00	-0,41	
27	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB			100.000	100.000	100.000			99.919	96.982	99.267			99,92	96,98	99,27	0	2,29	
V	Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.657.720	1.272.000	1.320.000			681.733	1.100.213									
28	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi			325.000	100.000	100.000			314.336	93.462	92.273			96,72	93,46	92,27	-34,61	-1,19	
29	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi			105.000	40.000	40.000			98.147	39.321	39.089			93,47	98,30	97,72	-30,95	-0,58	
30	Pengadaan alat studio			1.000.000	0	0			45.713	0	0			4,57	0	0	0	0	
31	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi			0	0	60.000			0	59.718				0	0	99,53	0	99,53	
32	Pemeliharaan jaringan teknologi			177.720	180.000	180.000			174.310	169.908	170.083			98,08	94,39	94,49	0,64	0,1	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	informasi Kabupaten Tegal																	
33	Monitoring, evaluasi dan pengendalian Menara telekomunikasi			50.000	0	0			49.226	0	0			98,45	0	0	0	0
34	Pengembangan Data Centre			0	100.000	150.000			0	97.907	137.276			0	97,91	91,52	50,00	-6,39
35	Pengelolaan Keamanan Informasi			0	30.000	45.000			0	24.068	36.681			0	80,23	81,51	50,00	1,28
36	Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Maya (SIMAYA)			0	50.000	0			0	48.574	0			0	97,15	0	0	-97,15
37	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik			0	237.000	280.000			0	194.834	270.467			0	82,21	96,60	18,14	14,39
38	Bimbingan Tekhnis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)			0	100.000	80.000			0	70.048	74.513			0	70,05	93,14	-20,00	23,09
39	Fasilitasi Penilaian Jabatan Pranata Komputer			0	40.000	60.000			0	31.487	54.908				78,72	91,51	50,00	12,79
40	Bimbingan Tekhnis Internet Sehat Bagi Masyarakat			0	70.000	60.000			0	58.105	58.328			0	83,01	97,21	-14,28	14,2
41	Bimbingan Tekhnis TIK Untuk Aparatur Pemerintah			0	75.000	65.000			0	66.030	64.263			0	88,04	98,87	-13,33	10,83

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
42	Pengembangan e-Government Kabupaten Tegal			0	200.000	200.000			0	157.635	187.220				78,82	93,61	0	14,79
43	Penyusunan DED jaringan infrastruktur			0	50.000	0			0	48.830	0			0	97,66	0	0	-97,66
44	Review DED Gedung TIK			0	0	75.000			0	0	74.572			0	0	99,43	0	99,43
45	Penyusunan Grand Design Data Management Sistem (DMS)			0	0	60.000			0	0	58.190			0	0	96,98	0	96,98
46	Penyusunan Grand Design Jaringan Intra Pemerintah Daerah			0	0	60.000			0	0	59.420			0	0	99,03	0	99,03
47	Festival Film Tegal			0	0	70.000			0	0	68.620			0	0	98,03	0	98,03
VI	Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				15.000	15.000				9.170								
48	Penyelenggaraan pameran investasi			0	15.000	15.000			0	9.170	13.931			0	61,14	92,87	0	31,73
VII	Program : Kerjasama informasi dengan mas media				568.000	280.000			546.441	256.438								
49	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			161.000	180.000	180.000			157.422	168.563	172.840			97,78	93,65	96,02	11,80	2,37

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
50	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			382.000	25.000	30.000			364.068	20.845	29.637			95,31	83,38	98,79	-36,72	15,41
51	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat			25.000	50.000	50.000			24.950	42.029	46.278			99,80	84,06	92,56	50,00	8,5
52	Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Tegal			0	25.000	40.000			0	25.000	38.170			0	100,00	95,43	60,00	-4,57
VII	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah			10.000	11.000	34.000			8.567	10.660								
53	Review renstra SKPD			10.000	0	0			8.567	0	0			85,67	0	0	0	0
54	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD			0	3.000	6.000			0	2.858	6.000			0	95,27	100	100,00	4,73
55	Penyelenggaraan forum SKPD			0	8.000	8.000			0	7.802	8.000			0	97,53	100	0	2,47
56	Penyusunan Renstra SKPD			0	0	20.000			0	0	19.375			0	0	96,88	0	96,88
	Jumlah			4.083.220	4.212.064	3.965.360			2.903.729	3.728.936				71,11	88,53		-1,35	

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / (Output)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Tegal pada Tahun 2020		Target Pasca Perubahan APBD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Sampai dengan Oktober	
					K	Rp.	K	Rp	K	Rp.
		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan				2.548.500.000		1.733.753.000		789.200.621
			Prosentase Layanan Kesekretaria tan	%	100,00		71,12		45,52	

		Penyediaan jasa kantor				447.500.000		267.880.000		220.047.444
			Tersedianya materai	lembar	1053,00		1053		439	
			Langganan listrik, telepon, air	bulan	12,00		12		6	
			ATK	jenis	45,00		45		45	
			Cetakan	jenis	5,00		5		5	
			Penggunaan	bulan	12,00		12		5	
			Komponen instalasi listrik	jenis	10,00		10		5	
			Alat rumah tangga	jenis	25,00		25		12	
			Bahan Bacaan	bulan	12,00		12		6	
			Survey Kepuasan Masyarakat	kali	1,00		0		0	
		Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor				330.000.000		305.000.000		149.218.262
			Pemeliharaan rutin/berkala	bulan	12,00		12		10	

			gedung kantor						
			Pemeliharaan peralatan kantor	bulan	12,00		12		10
			Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12,00		12		10
			THL	orang	2,00		2		2
		Pengadaan sarana dan prasarana kantor				1.030.000.000		897.120.000	293.606.181
			Pengadaan peralatan gedung kantor	unit	25,00		32		15
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	3,00		0		0
			Pengadaan kendaraan dinas roda dua	unit	9,00		0		0
			Pengadaan mebeleur	unit	3,00		0		0

		Peningkatan aparatur kapasitas sumberdaya				300.000.000		36.540.000		5.420.325
			Pendidikan dan pelatihan	tahun	1,00		1		0	
		Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja				71.000.000		34.350.000		15.754.500
			Laporan	jenis	2,00		2		2	
			Forum OPD	kali	1,00		1		1	
			Penyusunan Renja	kali	1,00		1		1	
			Penyelenggaraan Pameran	kali	2,00		0		0	
			THL	orang	2,00		0		0	
		Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah				70.000.000		61.640.000		45.121.750
			Laporan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	dokumen	1,00		1		1	
		Rapat koordinasi dan konsultasi				300.000.000		131.223.000		60.032.159

			Perjalanan dinas luar / dalam daerah	bulan	12,00		12		10	
			Penyediaan makan minum harian / rapat	bulan	12,00		12		10	
		Program Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media				1.432.000.000		907.871.000		326.531.604
			Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Masyarakat / Kelompok Informasi Masyarakat (LKM/ KIM) di Tingkat Desa	%	33		33		0	
			Kualifikasi peringkat KIP Badan Publik	skor	45,00		45		0	

		Diseminasi dan Dokumentasi Informasi				395.000.000		409.674.000		126.230.004
			Penerbitan koran	edisi	6,00		3		2	
			Cetak banner	banner	10,00		10		10	
			Liputan haji	kali	1,00		0		0	
			liputan arus mudik / balik	kali	1,00		0		0	
			Live Streaming	kali	40,00		40		35	
			THL	orang	3,00		3		3	
			Lomba Logo Hari Jadi	kali	1,00		2		1	
			Lomba Branding Kota Slawi	kali	1,00		1		0	
		Kelembagaan Komunikasi				350.000.000		128.161.000		59.963.100
			Operasional PPID	bulan	12,00		12		10	
			Pembinaan LKM / KIM	tahun	1,00		0		0	

			dan FK METRA						
			Raperda Konsultasi Publik	dokumen	1,00		1		1
			THL	orang	1,00		1		1
			Lomba PPID Pembantu	kali	1,00		0		0
			Lomba PPID Pemerintah Desa	kali	1,00		0		0
		Kemitraan Media				222.000.000		254.436.000	32.750.000
			Analisis Intelijen Media	topik	2,00		2		0
			Kemitraan Media	tema	10,00		10		10
			Press Tour	kali	1,00		0		0
			Pelatihan Jurnalistik	kali	2,00		2		1
						100.000.000		100.000.000	92.288.500

		Diseminasi dan Dokumentasi Informasi (DBHCHT)	Sosialisasi Cukai Rokok	tahun	1,00		1		1	
		Pembangunan tempat pemasangan banner/spanduk				365.000.000		15.600.000		15.300.000
			Tempat pemasangan banner / spanduk	buah	1,00		0		0	
		Program Teknologi Informasi dan Persandian				14.203.813.000		2.957.034.000		1.933.412.252
			Indeks SPBE	indeks	2,75		2,75		0,00	
			Indeks Keamaan Informasi	indeks	272		272		0	
		Infrastruktur				4.430.000.000		1.404.234.000		614.446.264
			Pemeliharaan jaringan	bulan	12,00		12		10	
			Pengelolaan pusat data	unit	1,00		1		1	
			Bintek administrator	kali	1,00		1		1	

			Sertifikasi pengelola pusat data	kali	1,00		1		0	
			Penyediaan bandwidth	bulan	12,00		12		10	
			Sewa jaringan	tahun	1,00		0		0	
			THL	orang	3,00		3		3	
		Aplikasi dan Telematika				1.060.000.000		294.369.000		212.824.262
			Pengembangan aplikasi	aplikasi	1,00		1		1	
			Penyusunan Perbup	perbup	1,00		1		1	
			Pengelolaan web	bulan	12,00		12		10	
			Operasional dewan TIK / relawan TIK	tahun	1,00		0		0	
			Sosialisasi domain	kali	1,00		1		1	
			THL	orang	7,00		7		7	
		Persandian				640.000.000		102.546.000		16.045.316

			Raperda	dokumen	1,00		0		0	
			Sosialisasi	kali	2,00		0		0	
			Bimtek	kali	1,00		0		0	
			Peningkatan SDM	tahun	1,00		0		0	
			Operasional Tim CSIRT	tahun	1,00		1		0	
			Audit Keamanan Informasi	tahun	1,00		1		0	
		Pembangunan Gedung TIK				4.000.000.000		17.512.000		17.511.250
			Pembangunan Gedung TIK	gedung	1,00		0		0	
		Pengadaan Peralatan Pusat Data Pemerintah Daerah				4.073.813.000		1.138.373.000		1.072.585.160
			Pengadaan peralatan pusat data	jenis	13,00		8		8	
						1.780.000.000		330.830.000		223.168.352

		Program Statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK	Prosentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	%	20		20		26,89
			Laju Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral oleh Penunjang SIM Single Data Statistik (SDS) /Open Data	%	10		10		20,52
		Statistik				960.000.000		215.166.000	136.368.000
			Pengelolaan SDS	tahun	1,00		1		0
			Roadmap Statistik	dokumen	1,00		0		0

			Pembinaan Statistik Sektoral	kali	2,00		1		1	
			Desa Open Data	desa	36,00		18		18	
			OPD Open Data	OPD	70,00		60		60	
			Penyusunan DMS	dokumen	1,00		0		0	
			Sosialisasi Statistik	kali	1,00		0		0	
			THL	orang	4,00		3		3	
		Sumber Daya TIK				820.000.000		115.664.000		86.800.352
			Bimtek TIK	orang	340,00		0		0	
			Fasilitasi Jabatan Pracom	tahun	1,00		0		0	
			Penyusunan Tata Kelola SPBE	dokumen	1,00		1		1	
			THL	orang	2,00		2		2	
			Master Plan Smart City	dokumen	1,00		0		0	

						19.964.313.000		5.929.488.000		3.272.312.829
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Tegal. Sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan komunikasi, informatika serta pengumpulan data statistik baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal maupun bagi stake holder lainnya.

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal antara lain:

- a. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut;
- b. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat;
- c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah;
- d. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi.
- e. Tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan akses TIK.
- f. Kurangnya perhatian terhadap keamanan informasi.
- g. Implementasi e-government yang belum maksimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal maupun dengan OPD lain ditingkat Daerah, Provinsi, maupun Pusat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan

pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dibidang Teknologi Informatika. Kedepan diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal memiliki tenaga fungsional di bidang IT yang lebih handal.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen besar dari pimpinan dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK;
- b. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pemetaan rencana pengembangan infrastruktur TIK
- d. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government;
- e. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika;
- g. Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dengan Perangkat Daerah yang lain, maupun pihak – pihak diluar pemerintah yang berkepentingan;
- h. Implementasi satu data daerah pada satu portal data;
- i. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Diskominfo Kabupaten Tegal melaksanakan penerapan e - Government (penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan) / Smart city. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Kominfo Kabupaten Tegal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pelayanan kominfo berbasis elektronik belum maksimal	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien belum memadai	Sarana dan prasarana di sejumlah perangkat daerah masih terbatas
		Terbatasnya layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses secara online	Tidak semua layanan publik dapat terintegrasi
2.	Tingkat keterbukaan informasi publik masih rendah	Penyebarluasan Informasi tentang pelayanan publik masih terbatas	Belum semua informasi tentang pelayanan publik terintegrasi
3.	Kualitas pemanfaatan data statistik masih rendah	Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik masih rendah dan kurang berkualitas	Terbatasnya ketersediaan data statistik sektoral yang valid dan berkualitas
4.	Tingkat layanan keamanan informasi belum maksimal	Keamanan informasi untuk pelayanan publik berbasis elektronik belum memadai	Belum keseluruhan sistem elektronik menggunakan sertifikat elektronik

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”**. Dalam rangka penjabaran misi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenang dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi pertama yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat”.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program, Dinas Komunikasi dan Informatika tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
<p>Visi : Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia</p> <p>Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat</p>	<p>Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik</p> <p>Fungsi : a. Penetapan rencana kerja; b. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;</p>	<p>Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien belum memadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya kesenjangan digital di perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk me ningkatkan Layanan SPBE perangkat daerah agar terintegrasi dengan sistem penghubung layanan
		<p>Terbatasnya layanan publik yang terintegrasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tata kelola dan ekosistem 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
	c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan	dapat diakses secara online	<i>eGovernment</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan	untuk me ningkatkan indeks SPBE •
		Penyebarluasan Informasi tentang pelayanan publik masih terbatas	• Masih banyak PPID OPD yang belum memberikan informasi pada publik • Masih kurangnya SDM untuk mengoperasikan web PPID Kuranganya pemberdayaan KIM berbasis	• Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam peningkatan keterbukaan informasi publik • Adanya kerjasama dan koordinasi

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
	kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian		teknologi informasi	yang baik antar OPD
		Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik masih rendah dan kurang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan • Belum adanya regulasi (baru ada Perpres satu data) • 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam pemanfaatan data statistik sektoral • Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD
		Keamanan informasi untuk pelayanan publik berbasis elektronik belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen para pengambil kebijakan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya tata kelola keamanan informasi • Terbatasnya tenaga teknis untuk pengamanan informasi 	dalam pemenuhan indeks keamanan informasi
		Ketersediaan dan keseragaman data/informasi yang dibutuhkan masih rendah dan kurang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan • Belum adanya regulasi (baru ada Perpres satu data) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam pemanfaatan data statistik sektoral • Adanya kerjasama dan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
			•	koordinasi yang baik antar OPD

3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015 – 2019

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan,

kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu: A. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan B. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran C. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran D. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka

memberikan pelayanan publik yang prima.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 untuk mendukung Visi Gubernur “Terwujudnya Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi “. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan untuk sebagai berikut :

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

No	Visi/Misi/Program Kdh	Tupoksi Diskominfo	Permasalahan	Faktor Penghambat Dan Pendorong
1	Visi : Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “Tetap Mboten Korupsi	1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-	1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain	Penghambat: a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; b. Koordinasi internal belum optimal;

No	Visi/Misi/ Program Kdh	Tupoksi Diskominfo	Permasalahan	Faktor Penghambat Dan Pendorong
	<p>Mboten Ngapusi”</p> <p>Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten /Kota</p> <p>Program Unggulan 3 : Reformasi birokrasi di Kabupaten / Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan system layanan terintegrasi</p>	<p>Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan EGovernment, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas</p>	<p>tata kelola SPBE masih belum optimal.</p> <p>3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal.</p> <p>Ketersedian data sektoral belum optimal.</p> <p>4. Pemanfaatan data sektoral belum optimal.</p> <p>5. Keterbukaan badan public belum optimal.</p> <p>6. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment</p>	<p>c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;</p> <p>d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai</p> <p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan daya saing daerah; - Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi public utama Jawa Tengah; - Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral Jawa Tengah; - Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 di bawah ini akan diuraikan faktor –faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS disajikan dalam tabel 3.4 :

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Rencana Pembangunan Gedung TIK	Belum adanya Gedung TIK yang meliputi gedung tempat kerja dan Gedung data centre yang memadai	Adanya refocusing APBD Tahun 2020, yang rencananya di tahun 2020 dilakukan pembangunan Gedung TIK tapi tertunda karena ada pemangkasan anggaran.	Penguatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis untuk Dinas Kominfo pada periode 2019 - 2024, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- 3) Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
- 4) Meningkatkan keamanan informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, Perubahan Renstra dilakukan karena adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran.

Berdasarkan hasil reviu internal, bahwa dengan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal telah dilakukan perubahan tujuan. Untuk sasaran tidak dilakukan perubahan hanya saja merubah beberapa indikator sasaran.

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan tujuan dan indikator tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebelum dan setelah dilakukan revisi atau perubahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	Indeks	2,82	3,11	3	3,25	3,4	3,55
		Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	2,82	3,11	3	3,25	3,4	3,55
		Meningkatnya keamanan informasi.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	147	262	300	350	400	456
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	Skor	68,55	83,96	50	60	70	79
			Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Persentase	10	0	55	78	100	100
		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	Persentase	16,8	26,84	40	60	80	100
			Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistic (SDS) / open data	Persentase	6	66,4	20	30	40	50

Berikut disajikan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal (Perubahan Renstra) :

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tegal		Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	OPD	8	12	24	26	48
		Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks	3,53	2	2	2,4	2,5
			Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Indeks	2,29	2	2,1	2,2	2,4
			Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks	3,39	2,9	2,9	2,9	3
			Indeks Manajemen SPBE	Indeks	NA	1,5	2	2,1	2,3
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	Nilai KIP Badan Publik	Skor	83,96	85	87	88	90
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	262	300	320	360	380

		Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	Data	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase	88,82%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

a) Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran Daerah/Perangkat Daerah secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Kesimpulannya, strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK;
2. Peningkatan Komunikasi Publik;
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Peningkatan pelayanan persandian.

- b) Strategi Pengarusutamaan dalam pembangunan
- Dalam penyusunan renstra/renja Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :
- 1) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja;
 - 2) Melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja;
 - 3) Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah;
 - 4) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah;
 - 5) Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan

anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.

5.2. KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikiran atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tegal dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan;
2. Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
3. Penguatan regulasi dan standarisasi tata kelola e-government;
4. Meningkatkan sarana prasarana TIK;
5. Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik;
6. Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi data Statistik Daerah;
7. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian;
8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika.

Perumusan strategi keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut iniDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
RPJMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

Sebelum Perubahan RPJMD				Sesudah Perubahan RPJMD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia				Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia			
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat				Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat			
Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyediaan Layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan

**Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal dan
Startegi dan Arah Kebijakan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal**

Perubahan RPJMD				Perubahan Renstra			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia				Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tegal	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat							Penguatan regulasi dan standarisasi tata kelola e-government
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan				Meningkatkan sarana prasarana TIK
				Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Peningkatan Komunikasi Publik	Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik	

					Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi data Statistik Daerah
					Meningkatnya keamanan informasi	Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian
							Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika
					Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Peningkatan Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Adapun Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Misi : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
- Tujuan : Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya anti korupsi dalam pemerintahan
- Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Renstra Dinas Kominfo :

- Tujuan : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Tegal
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
3. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral
4. Meningkatnya keamanan informasi
- Indikator : 1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE
3. Indeks Domain Layanan SPBE
4. Indeks Manajemen SPBE

5. Nilai KIP Badan Publik
6. Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data
7. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
8. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
9. Indeks Keamanan Informasi

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2019 - 2024 ditampilkan dalam Tabel-Tabel berikut ini :

Tabel. 6.1
Program Kegiatan Tahun 2020

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator	Target Setelah Perubahan	Rp.
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1. Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik 2. Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media	Diseminasi dan Dokumentasi Informasi	Penerbitan koran	3	285.016.000,00
				Cetak banner	10	
				Live Streaming	40	
				Lomba Logo Hari Jadi	1	
				Lomba Branding Kota Slawi	0	
			Kelembagaan Komunikasi	Operasional PPID	12	108.161.000,00
				Raperda Konsultasi Publik	1	
				Kemitraan Media	Analisis Intelijen Media	2
			Kemitraan Media		10	
			Pelatihan Jurnalistik	2		
Diseminasi dan Dokumentasi Informasi (DBHCHT)	Sosialisasi Cukai Rokok	1	100.000.000,00			
Pembangunan tempat banner /spanduk	Tempat pemasangan banner/ spanduk	0	15.600.000,00			
Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah	Indeks SPBE	Teknologi Informasi dan Persandian	Infrastruktur	Pemeliharaan jaringan	12	1.404.234.000,00
				Pengelolaan pusat data	1	
				Bintek administrator	1	
				Sertifikasi pengelola pusat data	1	
				Penyediaan bandwidth	12	
			Aplikasi dan Telematika	Pengembangan aplikasi	1	294.369.000,00
			Penyusunan Perbup	1		

Berbasis Elektronik (SPBE)				Pengelolaan web	12	
				Sosialisasi domain	1	
			Pembangunan Gedung TIK	Pembangunan Gedung TIK	0	17.512.000,00
			Pengadaan Peralatan Pusat Data Pemerintah Daerah		7	1.138.373.000,00
			Sumber Daya TIK	Penyusunan Tata Kelola SPBE	1	132.824.000,00
Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi		Persandian	Operasional Tim CSIRT	1	52.546.000,00
				Audit Keamanan Informasi	1	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	1. Prosentase dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data 2. Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM single data	Statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK	Statistik	Pengelolaan SDS	1	440.876.000,00
				Pembinaan Statistik Sektoral	2	
				Desa Open Data	18	
				OPD Open Data	60	

	statistik (SDS) / open data					
Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Prosentase Layanan Kesekretariatan	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Penyediaan Jasa Kantor	Prosentase Penyediaan Jasa Kantor	100	267.880.000,00
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	100	280.000.000,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana Kantor yang terlaksana	100	329.470.000,00
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase ketercapaian pelaksanaan Diklat/Bintek/Workshop	100	36.540.000,00
			Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Prosentase ketercapaian perencanaan, pengendalian dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	39.850.000,00
			Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Prosentase tersusunnya laporan penatausahaan keuangan dan BMD	100	70.000.000,00
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prosentase terpenuhinya pelaksanaan Rapat konsultasi/koordinasi ke dalam/luar daerah serta penyediaan makanan dan minuman rapat PD	100	158.223.000,00

Tabel 6.2
Program Kegiatan Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/(Output)	Target	Rp.
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.446.000.000,00
	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	50	
	Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	55	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
	Cetak majalah/banner/spanduk, Jumlah liputan arus mudik / balik, jumlah liputan haji, Jumlah publikasi kepada masyarakat, Sewa aplikasi	1272 eksemplar, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 paket	
Pelayanan Informasi Publik			
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
	Indeks SPBE	3	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			

	KUA dan KUA Perubahan	2 dok ; 1 Sistem	150.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	40	
	Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistic (SDS) / open data	20	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1.425.000.000

	Indeks Keamanan Informasi	300	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Laporan Bidang Pemerintahan, laporan sinkronisasi layanan kecamatan, laporan sinkronisasi layanan Pemerintahan Desa	1 lap; 1 lap, 1 lap	212.500.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			250.000.000
	Prosentase Layanan Kesekretariatan	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

	Jumlah Dokumen Perencanaan, Jumlah Dokumen Keuangan, Jumlah Dokumen Evaluasi, Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pameran Investasi, Jumlah kegiatan penyelenggaraan Forum OPD	4 dok, 2 dok, 3 dok, 2 kali, 1 kali	67.241.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah survey kepuasan masyarakat	1 kali	31.514.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.347.826.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			
	Jumlah bulan tersusunnya laporan penatausahaan keuangan dan BMD	12 bulan	71.918.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			

	diklat/bintek/pelatihan/workshop/seminar	1 tahun	45.000.000
Administrasi Umum			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	10 jenis	11.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah jenis terpenuhinya alat tulis kantor dan bahan komputer	59 jenis	56.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	Jumlah jenis alat rumah tangga dan bahan pembersih	47 jenis	13.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah bulan terpenuhinya makanan dan minuman harian dan rapat perangkat daerah	12 bulan	64.400.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Jumlah jenis terpenuhinya jasa penggandaan dan barang cetakan	9 jenis	16.200.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bulan	16.920.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	67.605.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	478.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	pengadaan tablet, pengadaan tangga aluminium, pengadaan Komputer dan Perlengkapannya (Corel Draw, Navicat Premium Enterprise, laptop, printer, PC Videografis, notebook IOS, Speaker active), pengadaan alat studio (Video Conference System, Headphone)	4 unit, 1 unit, 10 unit, 53 unit	448.334.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

	Jumlah lembar materai atau surat menyurat	435 materai	4.359.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (telepon dan internet)	12 bulan	100.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan			
	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas operasional	12 bulan	180.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	53.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	115.000.000

Tabel 6.3
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif (Perubahan Renstra)

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB	INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra PD (2024)		Unit Kerja PD
			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	8	24	11.526.890.000	26	35.925.868.000	48	20.893.954.000	48	68.346.712.000	
		Indeks Keamanan Informasi	262	320	310.213.000	360	570.000.000	380	610.000.000	380	1.490.213.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan Informasi	40,62%	50%	310.213.000	60%	570.000.000	75%	610.000.000	75%	1.490.213.000	
	1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		10	310.213.000	10	570.000.000	10	610.000.000	10	1.490.213.000	
		111	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1	90.000.000		-	90.000.000	
			Jumlah regulasi Tata Kelola Keamanan Informasi									

		111	Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)	16,33%	25%	310.213.000	30%	400.000.000	35%	450.000.000	35%	1.160.213.000	
			Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik / asset informasi yang telah diaudit				16%	80.000.000	20%	160.000.000	20%	240.000.000	
				Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2	2	3.164.030.000	2,4	11.770.000.000	2,5	12.260.000.000	2,5	27.194.030.000	
				Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2	2,1		2,2		2,4		2,4		
				Indeks Domain Layanan SPBE	2,8	2,9		2,9		3		3		
				Indeks Manajemen SPBE	NA	2		2,1		2,3		2,3		
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	16,67%	50%	3.164.030.000	75%	11.770.000.000	100%	12.260.000.000	100%	27.194.030.000	
				Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67%	70,83%		85,42%		100%		100%	-	
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan	45,00%	65,00%		75,00%		85%		85%		

				secara online dan terintegrasi									
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	NA		-	100%	2.690.000.000	100%	3.000.000.000	100%	5.690.000.000
			Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan nama Domain dan Sub Domain sesuai Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015	NA			100%	-	100%	-	100%	-
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terhubung dalam Jaringan Intra Pemerintah Daerah	NA			100%	2.690.000.000	100%	3.000.000.000	100%	5.690.000.000
	2.2		Kegiatan Pengelolaan <i>e-Government</i> Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan <i>eGovernment</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	NA	30%	3.164.030.000	40%	9.080.000.000	50%	9.260.000.000	50%	21.504.030.000
		111	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar	NA			75%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000

			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase layanan SPBE yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	NA		-	25%	-	30%	-	30%	-
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	NA	50%	280.000.000	75%	380.000.000	100%	460.000.000	100%	1.120.000.000
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	NA			40%	300.000.000	50%	400.000.000	50%	700.000.000
			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah dilakukan secara elektronik	NA	50%	640.000.000	75%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	2.140.000.000
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah daerah	NA	50%	2.244.030.000	75%	7.500.000.000	100%	7.500.000.000	100%	17.244.030.000
			Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase perangkat daerah yang dilakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan SPBE	NA			75	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000

				Nilai KIP Badan Publik	83,96	87	2.218.598.000	88	2.060.000.000	90	2.110.000.000	90	6.388.598.000	
3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	51,60%	65%	2.218.598.000	70%	2.060.000.000	80%	2.110.000.000	80%	6.388.598.000	
	2.1		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melakukan KIP	20%	55%	2.218.598.000	75%	2.060.000.000	100%	2.110.000.000	100%	6.388.598.000	
		111	Subkegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase aduan aspirasi publik yang ditindaklanjuti	NA	30%	500.000.000	40%	370.000.000	50%	380.000.000	50%	1.250.000.000	
		111	Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang menyiarkan program/ kegiatan pemerintah daerah	NA	5 media	1.021.191.000	5 media	325.000.000	5 media	325.000.000	5 media	1.671.191.000	
			Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang melaksanakan KIP	NA	30 OPD	203.435.000	40 OPD	275.000.000	48 OPD	290.000.000	48 OPD	768.435.000	
			Sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah sosialisasi/publikasi program/kebijakan pemerintah daerah	NA	5 kali	100.000.000	10 kali	560.000.000	15 kali	570.000.000	15 kali	1.230.000.000	

			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah pembinaan/pemb erdayaan dan kemitraan komunitas masyarakat	NA	6 kali	393.972.000	8 kali	170.000.000	10 kali	180.000.000	10 kali	743.972.000	
			Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	NA			5 layanan	360.000.000	5 layanan	365.000.000	5 layanan	725.000.000	
				Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	10532	12000	528.000.000	13000	1.058.000.000	14000	858.000.000	14000	2.444.000.000	
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%		100%		100%		1	0	
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%		100%		100%		1	0	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	39,47%	52,36%	528.000.000	59,47%	1.058.000.000	66,57%	858.000.000	66,57%	2.444.000.000	
	4.1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	671	921	528.000.000	1046	1.058.000.000	1171	858.000.000	117100,00%	2.444.000.000	

		111	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengelolaan Single Data System	NA	1 tahun	528.000.000	1 tahun	608.000.000	1 tahun	608.000.000	1 tahun	1.744.000.000	
				Pengelolaan Statistic Coaching Clinic (SCC)	NA	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		
				Jumlah OPD dan Bagian Open Data	NA	48 PD		48 PD		48 PD		48 PD		
				Rakor Data Operator PD Open Data	NA	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		
				THL	2 orang	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		
				Tersedianya Buku Profile Dinas Kominfo	NA	20 Buku		20 Buku				0,00%		
				Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang Dilakukan	NA	10 PD		15 PD		20 PD		20 PD		
				Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Dilakukan	NA	48 PD		48 PD		48 PD		48 PD		
				Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS	NA	10 PD		15 PD		20 PD		20 PD		
				Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS	NA	1 (satu) Kegiatan SCC		1 (satu) Kegiatan SCC		1 (satu) Kegiatan SCC		1 (satu) Kegiatan SCC		
			Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Dokumen Manajemen Data dan Implementasinya	NA			1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	400.000.000	
				Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik	NA			15 PD / 48 PD = 30%		40%		40,00%	-	

				Persentase Kelengkapan Metadata Variabel Dari Kegiatan Statistik	NA			15 PD / 48 PD = 30%		40%		40,00%	-
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Pembinaan dan Supervisi OPD Open Data	NA			2 kali	50.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	100.000.000
			Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Pengadaan Server Data Statistik dan Server Back Up Data Statistik	NA			1 kali	200.000.000			0	200.000.000
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	88,82%	100%	5.306.049.000	100%	20.467.868.000	100%	5.055.954.000	100%	30.829.871.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (Dinas Kominfo Kab Tegal)	86,67%	100%	5.306.049.000	100%	20.467.868.000	100%	5.055.954.000	100%	30.829.871.000
-	-	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase perencanaan, penganggaran dan evakuasi kinerja OPD yang tercapai		100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	355.000.000
-	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, pengendalian dan pelaporan evaluasi	NA			100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	30.000.000

				kinerja perangkat daerah										
-	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, pengendalian dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah	78,94%	100%	75.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	215.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat	0	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	110.000.000	
-	-	-											-	
-	-	-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian keuangan perangkat daerah		100%	2.575.000.000	100%	2.912.868.000	100%	3.196.954.000	100%	8.684.822.000	-
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	2.500.000.000	1 Tahun	2.840.868.000	1 Tahun	3.124.954.000	1 Tahun	8.465.822.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan	96,26%	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	72.000.000	1 Tahun	72.000.000	1 Tahun	219.000.000	
-	-	-											-	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	97,81%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	1.650.000.000	-
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	97,81%	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	750.000.000	
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi cukai	0,00%	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	900.000.000	

-	-	-											-	
-	-	-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100%	351.000.000	100%	357.000.000	100%	396.000.000	100%	1.104.000.000	-
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan		1 tahun	17.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	25.000.000	1 tahun	64.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik		1 tahun	11.000.000	1 tahun	16.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	45.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan komputer, Penyediaan ATK Kantor		1 tahun	60.000.000	1 tahun	63.000.000	1 tahun	68.000.000	1 tahun	191.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		1 tahun	30.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	68.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perarutan Perundang-Undangan	Surat Kabar dan Majalah		1 tahun	17.000.000	1 tahun	18.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	55.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum kantor		1 tahun	96.000.000	1 tahun	95.000.000	1 tahun	95.000.000	1 tahun	286.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 tahun	120.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	395.000.000	
-	-	-											-	
-	-	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,10%	100%	1.215.000.000	100%	15.955.000.000	100%	210.000.000	100%	17.380.000.000	

-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit	600.000.000	-	-	-	4 unit	600.000.000		
-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit pengadaaan mebel	16 jenis	250.000.000	10 jenis	150.000.000	-	-	26 jenis	400.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	14 jenis	240.000.000	11 jenis	205.000.000	11 unit	210.000.000	36 unit	655.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya			1 unit	200.000.000	-	-	1 unit	200.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaaan aset tak berwujud			1 jenis	200.000.000	-	-	1 jenis	200.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TIK			1 paket	15.000.000.000	-	-	1 paket	15.000.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 set	125.000.000	1 set	200.000.000	-	-	2 set	325.000.000	
-	-	-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	137.049.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	100%	482.049.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.000.000	1 tahun	15.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	125.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	425.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS Kesehatan Non PNS	1 tahun	7.049.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	42.049.000	
-	-	-											

-	-	-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,34%	100%	368.000.000	100%	403.000.000	100%	403.000.000	100%	1.174.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 tahun	115.000.000	1 tahun	115.000.000	1 tahun	115.000.000	1 tahun	345.000.000	
-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional / Lapangan		1 tahun	98.000.000	1 tahun	185.000.000	1 tahun	185.000.000	1 tahun	568.000.000	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor		1 tahun	55.000.000	1 tahun	103.000.000	1 tahun	103.000.000	1 tahun	261.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah (PD) selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala Daerah. Sesuai dengan pencermatan terhadap data RPJMD 2019-2024 berdasarkan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 seperti tersebut dalam Tabel 7, berikut hasil review Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Tegal sesuai tabel dibawah :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2018		2020	2021	2022	2023	
1	Indeks SPBE	2,58	2,2	3	3,25	3,4	3,55	3,55
2	Indeks Keamanan Informasi	147	262	300	350	400	456	456
3	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	41,6	83,96	50	60	70	79	79
4	Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	10	0	55	78	100	100	100
5	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	0	26,84	40	60	80	100	100
6	Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistic (SDS) / open data	0	66,4	20	30	40	50	50

Tabel 7.1.a Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target
		2018	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5
1	Indeks SPBE	2,58	2,2	3
2	Indeks Keamanan Informasi	147	262	300
3	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	41,6	83,96	50
4	Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	10	0	55
5	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	0	26,84	40
6	Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistic (SDS) / open data	0	66,4	20

Tabel 7.1.b Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		Tahun 2020	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	8	24	26	48	48
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2	2	2,4	2,5	2,5
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2	2,1	2,2	2,4	2,4
4	Indeks Domain Layanan SPBE	2,8	2,9	2,9	3	3
5	Indeks Manajemen SPBE	NA	2	2,1	2,3	2,3
6	Nilai KIP Badan Publik	83,96	87	88	90	90
7	Indeks Keamanan Informasi	262	320	360	380	380
8	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

10	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	88,82%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	16,67%	50%	75%	100%	100%
13	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67%	70,83%	85,42%	100%	100%
14	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00%	65,00%	75,00%	85%	85%
15	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	51,60%	65%	70%	80%	80%
16	Tingkat keamanan Informasi	40,62%	50%	60%	75%	75%
17	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	38,15%	52,36%	59,47%	66,57%	66,57%

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	8	12	24	26	48	48	
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2	2	2	2,4	2,5	2,5	
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2	2	2,1	2,2	2,4	2,4	
4	Indeks Domain Layanan SPBE	2,8	2,9	2,9	2,9	3	3	
5	Indeks Manajemen SPBE	NA	1,5	2	2,1	2,3	2,3	
6	Nilai KIP Badan Publik	83,96	85	87	88	90	90	
7	Indeks Keamanan Informasi	262	300	320	360	380	380	
8	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	10.532	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000	
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

11	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	88,82%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	16,67%	25%	50%	75%	100%	100%
13	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67%	54,17%	70,83%	85,42%	100%	100%
14	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00%	55,00%	65,00%	75,00%	85%	85%
15	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	51,60%	57%	65%	70%	80%	80%
16	Tingkat keamanan Informasi	40,62%	45%	50%	60%	75%	75%
17	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	39,47%	45,25%	52,36%	59,47%	66,57%	67%

Tabel 7.2.a Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi	Target
		2018	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5
1	Indeks SPBE	2,58	2,2	3
2	Indeks Keamanan Informasi	147	262	300
3	Kualifikasi Peringkat KIP Badan Publik	41,6	83,96	50
4	Prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	10	0	55
5	Prosentase dokumen data statistic sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) / open data	0	26,84	40
6	Laju pemanfaatan data dan informasi statistic sektoral oleh pengunjung SIM single data statistic (SDS) / open data	0	66,4	20

Tabel 7.2.b Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
		Tahun 2020	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	8	24	26	48	48
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2	2	2,4	2,5	2,5
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2	2,1	2,2	2,4	2,4
4	Indeks Domain Layanan SPBE	2,8	2,9	2,9	3	3
5	Indeks Manajemen SPBE	NA	2	2,1	2,3	2,3
6	Nilai KIP Badan Publik	83,96	87	88	90	90
7	Indeks Keamanan Informasi	262	320	360	380	380
8	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	10.532	12.000	13.000	14.000	14.000
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	88,82%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal periode Tahun 2019-2024, disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Perubahan Renstra ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan sumber daya manusia .
2. Melakukan upaya koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan indeks SPBE, indeks keamanan informasi, kualifikasi peringkat Badan Publik, dan data statistik sektoral.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dan diketahui pula oleh stakeholder

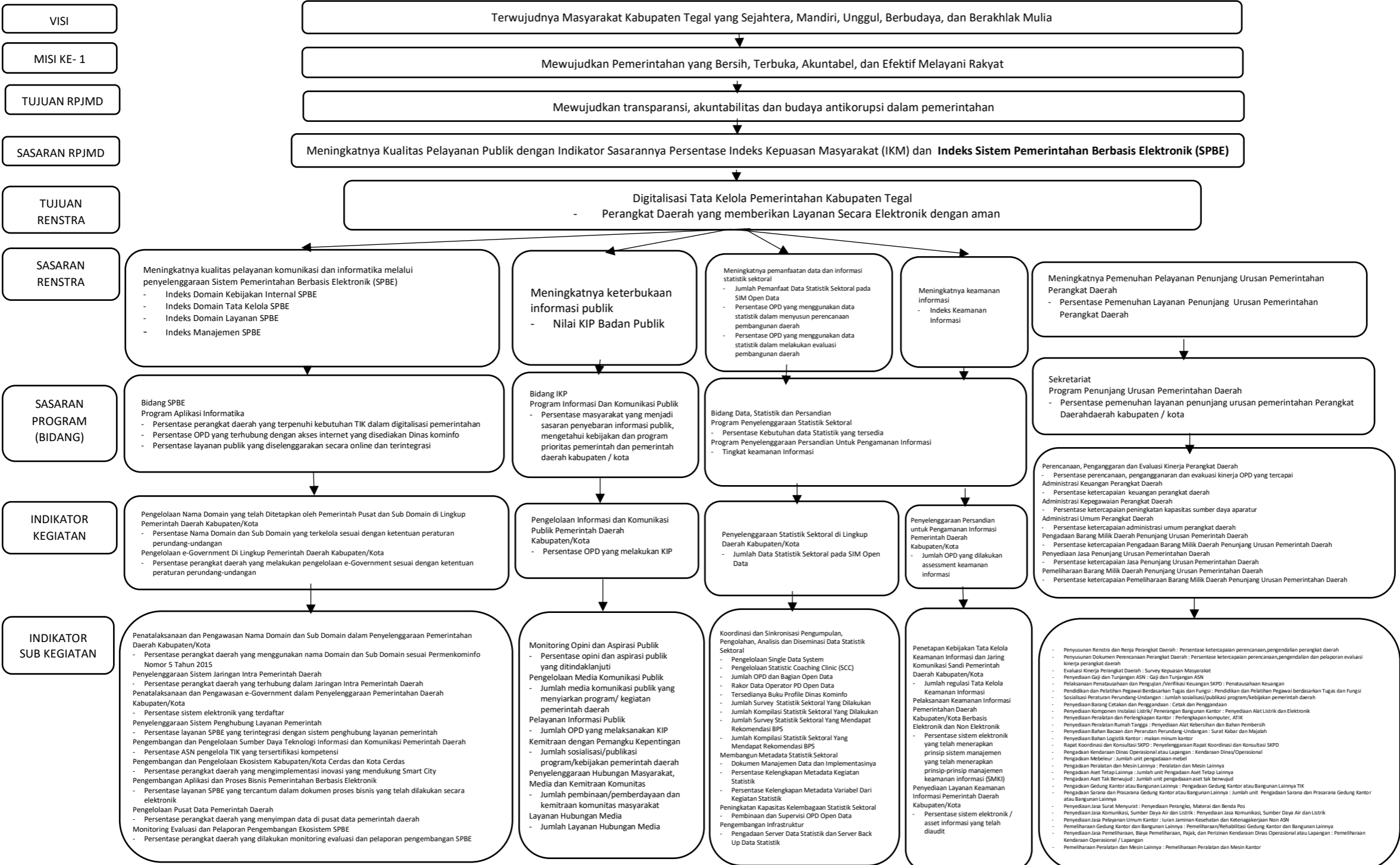
KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN TEGAL

DESSY ARIFianto, SSos MT

Pembina

NIP. 197212161997031004

CASE CADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019-2024

Tugas Pokok:

membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
IKU Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Pengukuran tingkat maturitas SPBE berdasarkan pada domain kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, layanan SPBE dan Manajemen SPBE (PermenPANRB No.59/2020)	Indeks; Tahunan	Laporan	2,18	2	2	2	2,4	2,5	Kepala Dinas Kominfo	
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE				2,57	2	2	2,1	2,2	2,4		
		Indeks Domain Layanan SPBE				3,15	2,8	2,9	2,9	2,9	3		
		Indeks Manajemen SPBE				NA	NA	1,5	2	2,1	2,3		
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	Nilai KIP Badan Publik	Skor perolehan KIP Badan Publik (skor 39-100), Peraturan Komisi Informasi No. 5/2016	Nilai; Tahunan	Laporan	68,55	83,96	85	87	88	90		

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
3	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	Jumlah pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	Jumlah; Tahunan;	Laporan	NA	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan;	Laporan	100	100	100	100	100	100		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen; Tahunan;	Laporan	100	100	100	100	100	100		
4	Meningkatnya keamanan informasi.	Indeks Keamanan Informasi	Nilai kematangan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) (Nilai 0 - 465), PermenKominfo 4/2016	Indeks; Tahunan	Laporan	147	262	300	320	360	380		

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
5	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100		

IKU Sekretaris

1	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (Dinas Kominfo Kab Tegal)	Layanan kesekretariatan	Prosentase ; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100	Sekretaris
---	---	---	-------------------------	----------------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

IKU Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentas; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		Prosentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perarutan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentas; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100		

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebeleur, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pengadaan Aset Tak Berwujud, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentas; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100		
		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentas; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100		
		Persentase ketercapaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentas; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100		

IKU Kasubag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Prosentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentas; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
		Prosentase ketercapaian keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentas; Tahunan	Laporan	100	100	100	100	100	100		
IKU Kabid Informasi dan Komunikasi Publik													
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Persentase ; Tahunan	Laporan	19	51,60	57	65	70	80	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	

IKU Kasi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terlaksananya OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik KIP	Persentase OPD yang melakukan KIP	Persentase OPD yang melakukan KIP	OPD	Laporan	NA	NA	20	55	75	100	Kasi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah media komunikasi publik yang menyiarkan program/ kegiatan pemerintah daerah	Jumlah media publikasi kepada masyarakat	media	Laporan	NA	5	5	5	5	5		

IKU Kasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1	Terlaksananya OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik KIP	Persentase OPD yang melakukan KIP	Persentase OPD yang melakukan KIP	OPD	Laporan	NA	NA	20	55	75	100	Kasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Jumlah OPD yang melaksanakan KIP	Jumlah OPD yang melaksanakan KIP	OPD	Laporan	NA	NA	10	30	40	48	

IKU Kasi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Daerah dan Publik

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terlaksananya OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik KIP	Persentase OPD yang melakukan KIP	Persentase OPD yang melakukan KIP	OPD	Laporan	NA	NA	20	55	75	100	Kasi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintah Daerah dan Publik	
		Jumlah pembinaan/ pemberdayaan dan kemitraan komunitas masyarakat	Jumlah pembinaan/ pemberdayaan dan kemitraan komunitas masyarakat	kali	kali	0	0	3	6	8	10		
		Jumlah tema kemitraan media	Jumlah tema kemitraan media	Tema	Laporan	0	10	10	10	10	10		
IKU Kabid Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Pengukuran perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK	Prosentase ; Tahunan	Laporan	16,67	16,67	25	50	75	100	Kabid Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Prosentase ; Tahunan	Laporan	16,67	16,67	54,17	70,83	85,42	100		
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Prosentase ; Tahunan	Laporan	30	45	55	65	75	85		

IKU Kasi Tata Kelola SPBE

1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan <i>eGovernment</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan <i>eGovernment</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	OPD	Laporan	NA	NA	20	30	40	50	Kasi Tata Kelola SPBE
		Jumlah OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	OPD	Laporan	7	18	8	8	7	0	

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
		Jumlah pengelolaan data centre	Jumlah pengelolaan data centre	Unit	Laporan	1	1	1	1	1	1		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah daerah	OPD	Laporan	NA	NA	25	50	75	100		
IKU Kasi Layanan SPBE													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan <i>eGovernment</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan <i>eGovernment</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	OPD	Laporan	NA	NA	20	30	40	50	Kasi Layanan SPBE	
		Persentase layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah dilakukan secara elektronik	Persentase layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah dilakukan secara elektronik	Layanan	Laporan	NA	NA	25	50	75	100		

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
		Jumlah aplikasi yang masuk dalam portal Kab Tegal	Jumlah aplikasi yang masuk / terintegrasi dalam portal Kab Tegal	Aplikasi	Laporan	5	5	8	10	10	10		
IKU Kasi Kebijakan SPBE													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan <i>eGovernment</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan <i>eGovernment</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	OPD	Laporan	NA	NA	20	30	40	50	Kasi Kebijakan SPBE	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	Orang	Laporan	0	0	25	50	75	100		
		Jumlah aparatur dan masyarakat yang di bimtek TIK	Jumlah aparatur dan masyarakat yang di bimtek TIK	Orang	Laporan	200	340	340	340	340	340		

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
IKU Kabid Data, Statistik dan Persandian													
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	nilai	Laporan	NA	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	Kabid Data, Statistik dan Persandian	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan;	Laporan	100	100	100	100	100	100		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen; Tahunan;	Laporan	100	100	100	100	100	100		

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
2	Meningkatnya keamanan informasi.	Tingkat keamanan Informasi	Nilai jumlah area keamanan informasi dibagi jumlah area keamanan informasi dikali 100%	Persen; Tahunan;	Laporan	22,8	40,62	45	50	60	75		

IKU Kasi Data dan Statistik

1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	Jumlah Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	Jumlah Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	Nilai	Laporan	0	671	796	921	1046	1171	Kasi Data dan Statistik
		Pengelolaan Single Data System	Pengelolaan Single Data System	Tahun	Laporan	NA	NA	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
		Pengelolaan Statistic Coaching Clinic (SCC)	Pengelolaan Statistic Coaching Clinic (SCC)	Tahun	Laporan	NA	NA	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
		Jumlah OPD dan Bagian Open Data	Jumlah OPD dan Bagian Open Data	OPD	Laporan	NA	NA	30 PD	48 PD	48 PD	48 PD	
		Rakor Data Operator PD Open Data	Rakor Data Operator PD Open Data	kali	Laporan	NA	NA	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
		Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang Dilakukan	Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang Dilakukan	OPD	Laporan	NA	NA	5 PD	10 PD	15 PD	20 PD	

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
							2020	2021	2022	2023	2024		
		Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Dilakukan	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Dilakukan	OPD	Laporan	NA	NA	30 PD	48 PD	48 PD	48 PD		
		Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS	Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS	OPD	Laporan	NA	NA	5 PD	10 PD	15 PD	20 PD		
		Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPS	kegiatan	Laporan	NA	NA	1 (satu) Kegiatan SCC	1 (satu) Kegiatan SCC	1 (satu) Kegiatan SCC	1 (satu) Kegiatan SCC		

IKU Kasi Persandian

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Capaian	Target					Penanggung jawab
								2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah OPD yang dilakukan assessment keamanan informasi	Jumlah OPD yang dilakukan assessment keamanan informasi	OPD;Tahunan	Laporan	NA	2	10	10	10	10		

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tegal

DESSY ARIEANTO, SSos MT

Pembina Tk. I

NIR 197212161997031004